

Outlook Investigasi Perkara dan Notifikasi M&A KPPU Sepanjang Tahun 2019 dan Proyeksi Anggaran KPPU TA 2020

KPPU memaparkan laporan capaian pada aktivitas notifikasi merger dan akuisisi di tahun 2019 serta proyeksi anggaran KPPU di tahun 2020. Hal itu disampaikan pada forum jurnalis yang diselenggarakan di KPPU, Jakarta.

Hadir pada forum jurnalis tersebut menjelaskan mengenai laporan dan capaian dimaksud yaitu Anggota KPPU Guntur S. Saragih, didampingi Direktur Merger dan Akuisisi (M&A) Daniel Agustino, Direktur Investigasi Gopprera Panggabean, serta Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Andi Zubaida Assaf.

Dijelaskan oleh Daniel bahwa pada tahun 2019, terdapat 101 aksi notifikasi yang disampaikan ke KPPU. Dari sejumlah itu bahwa tercatat sebanyak 94 notifikasi akuisisi, 3 notifikasi merger, dan 4 notifikasi konsultasi. Selanjutnya dari notifikasi tersebut diketahui bahwa 68 aksi dilakukan oleh antar pelaku usaha lokal, 13 aksi yang dilakukan oleh pelaku usaha asing terhadap pelaku usaha lokal, 18 aksi yang dilakukan antar pelaku usaha asing, dan 2 aksi yang dilakukan oleh pelaku usaha lokal terhadap pelaku usaha asing.

Selain itu, sektor kegiatan usaha dalam transaksi merger dan akuisisi yang dilaporkan KPPU di antaranya adalah:

- 20 notifikasi pada sektor energi, pertambangan, dan penggalian,
- 10 notifikasi pada sektor industri konstruksi, properti, dan pariwisata,
- 16 notifikasi pada sektor industri perbankan dan jasa keuangan non bank,
- 11 notifikasi pada sektor industri elektronik, informasi, dan komunikasi,
- 30 notifikasi pada sektor industri pengolahan,
- 6 notifikasi pada sektor industri transportasi dan logistik,
- 6 notifikasi pada sektor industri pertanian, perkebunan, dan peternakan,
- 2 notifikasi pada sektor industri retail makanan dan minuman.

Dalam 2 tahun terakhir terjadi tren perkembangan notifikasi merger dan akuisisi yang dilaporkan ke KPPU. Pada tahun 2018 notifikasi yang dilaporkan sebanyak 78 dan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 101 notifikasi.

Sementara dari sisi anggaran, Zubaida menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-704/MK.02/2019 tanggal 26 September 2019, Pagu Alokasi Anggaran KPPU TA 2020 untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha adalah sebesar Rp 130.338.589.000. Angka ini dinilai mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah anggaran di tahun 20019 yaitu sebesar Rp136.631.030.000 dengan prosentase pencapaian penyerapan sebesar 97%.

Guntur menyampaikan bahwa dalam hal ini KPPU memikul beban yang cukup berat mempertimbangkan nilai anggaran yang menurun sementara pertumbuhan ekonomi terus meningkat di tahun 2020. Selain itu, KPPU juga memiliki tugas baru terutama dalam hal pengawasan kemitraan yang membutuhkan perhatian khusus. Sebagaimana disampaikan bahwa di tahun 2020 KPPU memiliki 14 fokus alokasi kegiatan yaitu:

1. Pemantauan dan Kajian Persaingan Usaha,
2. Analisis Kebijakan Pemerintah,
3. Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan,
4. Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat,

5. Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat,
6. Penilaian Merger dan Akuisisi,
7. Pengawasan Kemitraan,
8. Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha,
9. Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah (Kanwil) KPPU,
10. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Eksekusi,
11. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis KPPU,
12. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran KPPU,
13. Penyelenggaraan Komunikasi Lembaga,
14. Pengawasan Akuntabilitas dan Aparatur Negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Namun, penurunan jumlah anggaran 2020 tidak menjadi sebuah alasan besar bagi KPPU untuk mengurangi atau menurunkan kinerjanya. Kenyataannya pegawai yang bertahan hingga saat ini mengedepankan loyalitas dan keikhlasan.

Di penjelasan akhir, Gopprera juga turut menjelaskan mengenai laporan atas beberapa capaian data pada Direktorat Investigasi sepanjang tahun 2019 yang dinilai mengalami peningkatan jumlah. Tercatat bahwa pada tahun ini terdapat 71 kegiatan penyelidikan (67 penyelidikan tahun 2018), 151 klarifikasi laporan (132 laporan tahun 2018), 47 penelitian inisiatif (38 inisiatif tahun 2018).

Sumber perkara KPPU dapat berasal dari inisiatif maupun laporan yang masuk, dan proses nya harus melewati tahapan penelitian terlebih dahulu sebelum naik menjadi penyelidikan, penyidikan maupun pemberkasan sehingga layak dinyatakan sebagai sebuah perkara. Disampaikan pula bahwa hingga saat ini terdapat 15 perkara berjalan dimana 12 perkara terkait merger, dan lainnya terkait dugaan diskriminasi oleh Grab, dugaan kartel tiket pesawat, dan perkara tender PDAM Lampung.

Catatan bagi Jurnalis:

1. KPPU mendapatkan pagu anggaran dari APBN dan PNBPN sesuai dengan PP No.68/2015.
2. Inflasi ekonomi Indonesia pada APBN 2019 adalah sebesar 3,5%.
3. Inflasi ekonomi Indonesia pada APBN 2020 adalah sebesar 3,1%.
4. Pendapatan negara pada tahun 2019 adalah Rp2.165,1 T dengan belanja sebesar Rp2.461,1 T.
5. Pendapatan negara pada tahun 2020 adalah Rp2.233,2 T dengan belanja sebesar Rp2.540,4 T.
6. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 9 Desember 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
